



SAKINAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR :2098/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TABANAN

NOMOR : 1587/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PENEBEL KECAMATAN PENEBEL  
KABUPATEN TABANAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TABANAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN

2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 telah ditetapkan dan diangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1587/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2020;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali

Kotasebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1587/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- d. bahwa Perubahan Keputusan sebagaimana pada huruf c diatas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

- Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - 10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.02-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 694/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.2-Kpt/5102/Kpu-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Pemeriksaan Rapid Test atau Swab Test Covid-19 Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR : 1587/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PENEBEL KECAMATAN PENEBEL KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Melaksanakan Perubahan pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor :1587/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, yaitu mengganti nama-nama yang dinyatakan Reaktif pada saat Rapid Test Covid-19 yang selengkapnya disajikan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk memudahkan pemahaman terhadap keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1587/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2020 tentang

Penetapanan Pengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara di Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan ini, disusun dalam satu naskah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai laporan.

Ditetapkan di Tabanan  
Pada tanggal 23 November 2020

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

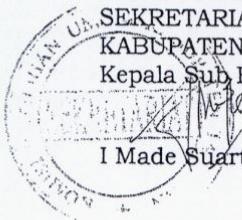
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PENEBEL.

ttd

I G P AGUS KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

I Made Suartika



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN  
NOMOR : 2098 /PP.04.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR : 1587/PP.04.2-  
Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PENEBEL KECAMATAN  
PENEBEL KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TABANAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK  
LANJUTAN TAHUN 2020.

DATA KELOMPOK ANGGOTA PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PENEBEL KECAMATAN PENEBEL KABUPATEN TABANAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN DALAM  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

DESA PENEBEL.

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 004) :

NO.	N A M A		L/P	ALAMAT
	LAMA	BARU		
1	2	3	4	5
1	GST AYU SUGIAWATI	I GST. AYU CITRA DEWI	P	BR. UBUNG
2	I GEDE MADE REZA NATHA KUSUMA	WAYAN WIRA HARDI KRISNAWAN	L	BR. UBUNG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 005) :

NO.	N A M A		L/P	ALAMAT
	LAMA	BARU		
1	2	3	4	5
1.	I MADE ADI ASTAWA	NI PUTU NOVITA PERMATA SARI	P	BR. KARADAN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 008) :

NO.	N A M A		L/P	ALAMAT
	LAMA	BARU		
1	2	3	4	5
1.	I GEDE MADE SURATA PRABOWO	I GEDE PUTU YADNYA PUTRA	L	BR. SUNANTAYA KELOD

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PENEBEL

t t d,

I G P AGUS KURNIAWAN.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

